

BAB IV

ANALISA TERJADINYA KONFLIK PERBATASAN DI RAS DOUMEIRA ANTARA ERITREA DENGAN DJIBOUTI PADA TAHUN 2008

BAB IV, merupakan bab yang membahas rumusan masalah, Mengapa terjadi konflik perbatasan di Ras Doumeira antara Eritrea dengan Djibouti pada tahun 2008-2010. Konflik yang terjadi di Ras Doumeira perbatasan antaran Eritrea dengan Djibouti merupakan masalah keamanan yang masih terjadi dan belum terselesaikan sampai saat ini. Dalam konflik tersebut tentu banyak menyita banyak perhatian dari dunia internasional, dimana dalam konflik ini kedua negara tetap bersikeras dalam merebut wilayah yang luasnya hanya sekitar 1.29 km².

Serta adanya *security dilemma* yang terjadi antara kedua negara diantaranya adalah Djibouti merasa terancam karena berada di wilayah rawan konflik dimana salah satu tetangganya merupakan negara yang otoriter yang sangat berorientasi dengan militer. Sedangkan pihak Eritrea merasa terancam dengan keberadaan basis-basis militer yang semakin marak dibangun di Djibouti. Serta masih belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan garis batas perbatasan antara keduanya.

A. Pemerintah Eritrea yang Otoriter di Bawah Kendali Rezim Isaias Afewerki

Pemerintah Eritrea merupakan rezim otoriter di bawah kendali satu-satunya partai politik di negara tersebut yaitu *The People's Front for Democracy and Justice* (PFDJ), dan dipimpin oleh presiden Afewerki. PFDJ telah mengendalikan Eritrea sejak tahun 1991, yang sebelumnya merupakan sebuah gerakan pembebasan rakyat Eritrea atau *The Eritrean People's Liberation Front* (EPLF).

Sejak pengangkatannya pada tahun 1993, Presiden Afwerki telah menjadi kepala legislatif (*the Transitional National Assembly*) dan eksekutif (dewan negara). Dengan demikian tidak ada pemisahan kekuasaan antara legislatif dengan eksekutif. Para anggota Majelis Nasional Peralihan secara langsung ditunjuk pada tahun 1997 untuk berfungsi sebagai legislatif setelah ratifikasi Konstitusi sampai pemilihan Majelis Nasional. Namun, pemilihan yang dijadwalkan untuk tahun 2001 telah ditunda tanpa batas. Dengan demikian, Majelis ini menjadi parlemen transisi sejak 1997.

Tidak adanya demokrasi, serta penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen telah ditunda tanpa batas, membuat presiden Afwerki dan satu-satunya partai politik di Eritrea (PFDJ), terus mendominasi politik di Eritrea. Menjadikan tingkat ketidakpuasan penduduk dengan rezim meningkat. Serta diperparah oleh kurangnya lapangan pekerjaan, layanan militer yang panjang dan ketidakstabilan ketersediaan pasokan makanan, membuat banyak warga Eritrea memilih untuk mencari suaka keluar negeri. Banyak diantara mereka merupakan golongan pengusaha dan anak muda yang memiliki potensi.

Bagi Rezim Isaias keberangkatan anak muda dan warga negaranya yang tidak puas dengan rezim merupakan jalan keluar bagi pemerintah Isaias untuk mengurangi risiko kerusuhan domestik, dan pada saat yang sama menyediakan penghasilan bagi devisa negara dengan “*diaspora taxes*” atau pajak para diaspora yang mengirim uang dalam bentuk mata uang asing dari luar negeri. (Zaken, 2017)

Selama dua dekade terakhir sejak kemerdekaannya pada 1991, kebijakan luar negeri Eritrea telah ditandai oleh konflik dan konfrontasi. Yang menyebabkan banyak terjadi masalah baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti masalah hubungan dengan semua negara tetangga Eritrea dimana, ada tiga negara yang berbatasan langsung di darat dan satu negara berbagi perbatasan di perairan dengan Eritrea mengalami permasalahan perbatasan yang mengakibatkan hubungan antara

Eritrea dengan negara-negara tersebut menjadi tidak harmonis termasuk konflik dengan Ethiopia dan Djibouti.

Demikian juga, hubungan di kancah internasional juga mengalami ketegangan, dimana pada tahun 1990-an hubungan Eritrea dengan Amerika Serikat telah membeku sejak pecahnya konflik di perbatasan Eritrea dengan Ethiopia pada tahun 1998. Hubungan Eritrea dengan PBB, Uni Afrika dan Uni Eropa juga mengalami keterpurukan akibat dari rezim Isaisan yang tidak mau menyelesaikan masalah dengan damai.

Ada laporan yang konsisten dan terus-menerus tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Eritrea. Seperti adanya kerja paksa dengan durasi tak terbatas melalui program layanan nasional wajib; dan pembatasan ketat kebebasan sipil termasuk kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, dan beragama. Hak asasi manusia dan Kebebasan berpendapat di Eritrea sangat di batasi. Dalam hal pemerintahan yang demokratis, Eritrea secara konsisten ditempatkan pada peringkat terendah. Dalam indeks Ibrahim tahun 2011 tentang pemerintahan yang baik di Afrika, Eritrea menduduki peringkat ke-47 dari 53 negara yang ada di Afrika.

Dimana *the Ibrahim Index of African Governance* (IIAG) merupakan indeks yang diterbitkan setiap tahun dan memberikan ukuran statistik kinerja pemerintahan di setiap negara Afrika. Pemerintahan didefinisikan oleh Yayasan Mo Ibrahim sebagai penyediaan barang dan jasa politik, sosial dan ekonomi yang setiap warga negara berhak untuk mengharapakan dari negaranya, dan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada warganya.

Definisi dalam indeks Ibrahim difokuskan pada output dan hasil kebijakan. Kerangka kerja tata kelola IIAG terdiri dari empat kategori: 1) Keselamatan & Aturan Hukum, 2) Partisipasi & Hak Asasi Manusia, 3) Peluang Ekonomi Berkelanjutan, dan 4) Perkembangan manusia. (Ibrahim, 2018)

Gambar 4.1.

Indeks Ibrahim negara Eritrea

ERITREA



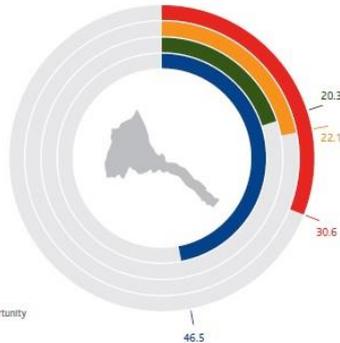
OVERALL
GOVERNANCE

2014 SCORES & RANKS

| SCORE/100 | AFRICAN AVERAGE | CHANGE SINCE 2011 | RANK/54 |
|-----------|-----------------|-------------------|---------|
| 29.9 | 50.1 | -0.4 | 50 |

| | |
|--|---------------------------|
| Head of State | President Isaias Afewerki |
| Date came to power | 8 June 1993 |
| Head of Government | President Isaias Afewerki |
| Date came to power | 8 June 1993 |
| Region | East Africa |
| REC Membership(s) | CEN-SAD, COMESA, IGAD |
| Population (total m) | 6.5 |
| Urban population (% of total population) | 22.2 |
| African Peer Review Mechanism | Not member |
| African Charter on Democracy, Electons and Governance | Not signed, Not ratified |
| African Charter on Statistics | Not signed, Not ratified |

Information correct at 23 July 2015



- Safety & Rule of Law
- Sustainable Economic Opportunity
- Participation & Human Rights
- Human Development



SAFETY &
RULE OF LAW



PARTICIPATION
& HUMAN RIGHTS



SUSTAINABLE
ECONOMIC
OPPORTUNITY



HUMAN
DEVELOPMENT

| SCORE/100 | SCORE/100 | SCORE/100 | SCORE/100 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30.6 | 22.1 | 20.3 | 46.5 |
| AFRICAN AVERAGE | AFRICAN AVERAGE | AFRICAN AVERAGE | AFRICAN AVERAGE |
| 51.3 | 49.3 | 43.2 | 56.4 |
| CHANGE SINCE 2011 | CHANGE SINCE 2011 | CHANGE SINCE 2011 | CHANGE SINCE 2011 |
| -0.6 | -2.1 | -0.9 | +2.0 |
| RANK/54 | RANK/54 | RANK/54 | RANK/54 |
| 48 | 51 | 51 | 44 |

Sumber : Mo Ibrahim Foundation

http://static.moibrahimfoundation.org/u/2015/10/02201346/18_Eritrea.pdf

diakses pada tanggal 30 Maret 2018

Pada grafik di atas didapati bahwa; Eritrea memiliki skors 30.6 dari 100 di sektor Keamanan dan Hukum. Keadaan keamanan dan hukum yang ada di Eritrea berada di bawah rata-rata negara-negara di Afrika. Skors tersebut sesuai dengan keadaan yang ada dan situasi yang ada di Eritrea dimana rezim

Isaias sangat memegang kendali terutama dalam mengeluarkan aturan-aturan bagi warga negaranya. Sehingga keadaan keamanan dalam negeri maupun regional menjadi tidak stabil. Keadaan keamanan Eritrea sangat diawasi oleh otoriter rezim Isaias, terutama di sepanjang wilayah perbatasan Eritrea merupakan wilayah yang tidak aman dan berbahaya.

Partisipasi & Hak Asasi Manusia, mendapatkan skors 22.1 dari 100 serta di bawah rata-rata negara-negara Afrika yakni 49.3. Partisipasi yang dimaksud dalam indeks Ibrahim adalah partisipasi warga negara dalam bidang politik dan urusan pemerintahan. Dalam bidang politik warga negara Eritrea tidak memiliki hak suaranya dalam memilih pemimpin, dimana pemilu yang pernah diadakan dinegara ini hanya terjadi sekali ketika partai PFDJ menyalonkan Isaias Afewerki menjadi pemimpin negara tersebut. Dan pemilu tidak diadakan kembali setelahnya.

Sedangkan dalam bidang HAM Eritrea juga sangat rendah dimana semua hak-hak warga negara dibatasi oleh rezim Isaias. Dimana pada tahun 1996, Pemerintah Eritrea mengesahkan undang-undang yang mengharuskan semua jurnalis dan publikasi untuk dilisensikan oleh pemerintah. Mengumumkan bahwa semua organisasi media yang independen ditutup atau diawasi oleh rezimnya. Wartawan-wartawan dikumpulkan dan dimasukkan ke penjara. Keadaan kebebasan pers yang menyedihkan di negara Tanduk Afrika Eritrea telah berada di peringkat terbawah dari Indeks Kebebasan Pers (Gaffey, 2017). Skors tersebut pantas diberikan kepada pemerintahan Eritrea karena kurangnya kontribusi rakyatnya terhadap politik pemerintahan negara tersebut serta gagalnya pemerintah Eritrea dalam memberikan hak-hak asasi manusia kepada warga negaranya.

Peluang Ekonomi Berkelanjutan, mendapatkan skors 20.3 dan dibawah rata-rata negara yang ada di Afrika yaitu 43.2 dari 100. Hal tersebut dikarenakan Eritrea belum sepenuhnya pulih dari pasca kemerdekaan serta diperparah dengan konflik yang terjadi dengan seluruh negara tetangganya yang memakan biaya

militer dan pertahanan yang besar. Terlebih anggaran negara banyak difokuskan untuk pertahanan negara, selain itu investor asing juga enggan menanamkan investasi di negara tersebut karena kurang kondusifnya kestabilan keamanan di Eritrea.

Dan yang terakhir adalah *Human development* atau Perkembangan manusia, berbeda dengan ketiga faktor lainnya yang mendapatkan skors antara 20-30 saja, dalam faktor pembangunan manusia Eritrea mendapatkan nilai tertinggi dari faktor-faktor lainnya yaitu 46.5 walaupun masih dibawah rata-rata negara-negara di Afrika yakni 56.4. *Human development* sendiri merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup rata-rata angka harapan hidup dan kesehatan; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Dalam perkembangannya Eritrea terus membuat kemajuan dalam pembangunan manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya, tingkat melek huruf warganya yang dapat membaca dan menulis meningkat dari 52,5% pada tahun 2002 menjadi 73,8% pada tahun 2015. Tingkat kematian anak dan probabilitas kematian dari 1.000 kelahiran mengalami penurunan dari 89,1 pada tahun 2000 menjadi 46,5 pada tahun 2015. Indikator lain yang menunjukkan peningkatan yang signifikan adalah: tingkat warga yang mendaftarkan untuk sekolah meningkat; kematian ibu menurun; dan maraknya kampanye kesehatan masyarakat. Kemajuan ini sangat penting untuk pelaksanaan agenda global untuk Pembangunan Berkelanjutan terutama tujuan memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua di semua usia, memastikan pendidikan berkualitas inklusif dan adil dan mempromosikan peluang belajar seumur hidup untuk semua. (Nyende & Mugisha, 2017)

Walaupun adanya perbaikan terutama dalam bidang pembangunan manusia di Eritrea tetap saja rezim Isaias tersebut belum dapat membuat negara tersebut stabil, terutama dalam bidang keamanan baik keamanan domestik maupun regional. Terlebih dengan sistem pemerintahan yang otoriter dengan karakter militeristiknya membuat warga negaranya merasa dibatasi hak-haknya. Serta negara tetangganya terutama Djibouti merasa terancam karena ketidakstabilan domestik Eritrea dan belum selesainya konflik perbatasan di keduanya serta dalam Laporan Pengawasan Hak Asasi Manusia pada taun 2012 menggambarkan Eritrea sebagai salah satu negara paling represif dan tertutup di dunia.

B. Meningkatnya Kerjasama Militer antara Djibouti dengan Asing

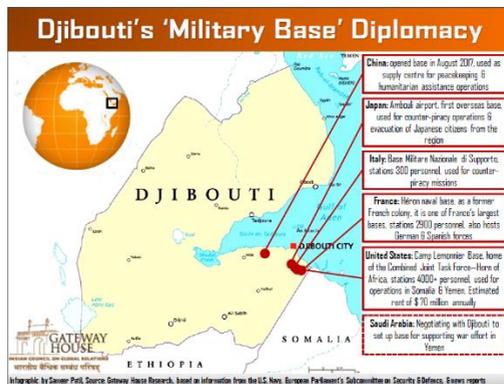
Djibouti merupakan negara kecil yang terletak di tanduk Afrika dan dikelilingi oleh negara-negara yang memiliki ketegangan baik domestik maupun internasional. Seperti Somalia yang merupakan *weak state* dimana otoritas pemerintahan Somalia tidak kuat dan berjalan dengan baik dan tidak mampu mengatasi masalah dalam negerinya seperti pemberontakan di laut Somali.

Serta Eritrea yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan memiliki sejarah yang tidak baik dengan Djibouti terutama di sepanjang wilayah perbatasannya membuat Djibouti benar-benar dikepung oleh negara-negara yang bermasalah. Namun disisi lain letak geografis dari Djibouti yang berada jalur perdagangan internasional serta terletak di kawasan yang tidak stabil dalam keamanan seperti di Afrika Timur dan Timur tengah (Yaman) menjadikan banyak negara kuat seperti Amerika Serikat dan China mempunyai kepentingan di Djibouti.

Selain Amerika Serikat, ada pula negara-negara besar lainnya yang mendirikan basis pangkalan militernya di Djibouti antara lain adalah Perancis, Jepang dan Italia. Sedangkan China

dan Arab Saudi masih dalam proses pembangunan. Serta ada pula pasukan militer dari Rusia, Spanyol, Jerman, dan Inggris yang beroperasi di Djibouti. Karena dikuasai oleh kekuatan asing, pemerintah Djibouti mendapatkan banyak keuntungan dari adanya pangkalan militer asing tersebut antara lain pemerintah Djibouti setidaknya mendapatkan US\$ 300 juta per tahun dari setiap pangkalan yang ada di negaranya, serta mendapatkan jaminan perlindungan dan bantuan militer ketika negara tersebut mengalami kondisi bahaya atau mendapat tekanan dari negara-negara tetangganya. (Acheson, 2016)

Gambar 4.2.
Gambar Persebaran Pangkalan Militer di Djibouti



Sumber : http://www.gatewayhouse.in/wp-content/uploads/2017/10/SP_Djibouti---s---Military-Base---Diplomacy_Oct2017.pdf

diakses pada tanggal 31 Maret 2018

Djibouti yang memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1977 dan selama dua dekade berikutnya Perancis tetap menjadi kekuatan dominan di negara ini, telah membantu memberikan dana bagi pemerintah Djibouti, dan menjamin pertahanan negara sebagai ganti dari pembangunan pangkalan militer dan fasilitas pelatihan yang ekstensif, sampai saat ini. Diperkirakan pasukan militer Prancis yang berbasis di Djibouti

(atau FFDj *Forces françaises stationnées à Djibouti*) sekitar 2.900 personil. *Naval base of Héron* atau pangkalan laut Perancis merupakan pangkalan terbesar yang dimiliki oleh Perancis dan sekaligus menjadi pangkalan militer bagi tentara Spanyol dan Jerman yang beroperasi di Djibouti.

Selanjutnya ada Camp Lemonnier yang merupakan basis pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Djibouti. Camp Lemonnier adalah satu-satunya pangkalan militer AS yang permanen di Afrika. (Whitlock, 2012) posisi pangkalan militer ini sangat strategis dimana terletak di kota Ambouli dan tepat berada di sisi selatan bandara internasional Djibouti-Ambouli. Sekitar 6.400 personel militer dan warga sipil Amerika Serikat berada di basis militer ini. Selain mendapat perlindungan dari militer AS, Djibouti mendapatkan uang sewa sebesar US\$ 70 juta setiap tahunnya dari sewa Camp Lemonnier ini.

Selanjutnya ada Jepang dan China yang memiliki pangkalan militer di Djibouti. Uniknya kedua negara tersebut baru memiliki pangkalan militer di luar wilayah negara dan terletak di Afrika. Jepang terlebih dahulu membangun pangkalan militer di Djibouti dengan sekitar 600 personel yang dikerahkan dari Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. Jepang dilaporkan membayar US\$ 30 juta per tahun untuk fasilitas militer. (Styan, 2013) sedangkan China memulai kerjasama dengan Djibouti setelah adanya keputusan pada tahun 2008 untuk berpartisipasi dalam *Gulf of Aden counterpiracy operations*, Beijing semakin melibatkan militernya dalam mengejar kepentingan nasional China di wilayah tersebut. Pembentukan fasilitas dukungan militer ini menunjukkan bahwa Beijing melihat peran jangka panjang untuk militernya dalam melindungi kepentingan Cina di luar negeri.

Hubungan Tiongkok dan Djibouti telah menguat dalam beberapa tahun terakhir karena kedua negara memiliki ambisi ekonomi dan keamanan yang saling melengkapi. China menganggap Djibouti merupakan sebuah negara kecil yang terletak di kawasan tandus di Tanduk Afrika. China mencari peluang untuk memperluas kehadirannya di Afrika Timur untuk

beberapa alasan. Secara khusus, Beijing memiliki kepentingan antara lain; Menemukan pasar baru di Afrika terutama dalam bidang. Meningkatkan kemampuan ekspedisi militer Tiongkok agar menjadi lebih baik menjaga warganya dan aset di wilayah tersebut. Serta mendukung ekonomi "*One Belt, One Road*" Presiden Xi Jinping. Kerjasama tersebut diperkuat dengan keadaan domestik Djibouti yang relatif stabil di wilayah yang tidak stabil, hal tersebut mempermudah China dalam melaksanakan kepentingannya di Djibouti.

Dengan maraknya basis militer asing yang ada di Djibouti tentu saja membuat negara tersebut mendapat berbagai keuntungan diantaranya adalah mendapatkan pendapatan dari hasil menyewakan tempat bagi militer asing yang otomatis tentu menjaga kedaulatan negara Djibouti dari gangguan atau tekanan negara tetangganya, serta adanya transfer ilmu dan teknologi dari kerjasama militer antara Djibouti dengan negara-negara tersebut.

Djibouti telah berusaha memanfaatkan keuntungan geografinya untuk menghasilkan mata uang dengan menyewakan lahan ke beberapa militer asing. Djibouti bercita-cita menjadi pusat komersial seperti Singapura di Afrika Timur. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perluasan infrastruktur secara dramatis.

Namun disisi lain negara Eritrea merasa terancam dengan keberadaan pangkalan militer asing yang berada di Djibouti. Kondisi tersebut merupakan *security dilemma* dimana keadaan ketika adanya peningkatan atau penurunan keamanan di suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lainnya. Eritrea sendiri tidak memiliki basis militer asing yang ada di negaranya, bahkan sejak negara tersebut berjuang meraih kemerdekaannya, Eritrea tidak bekerjasama atau meminta bantuan asing.

Meskipun dalam komposisi penduduk dan anggaran belanja militer Eritrea lebih memadai daripada Djibouti, namun tetap saja keberadaan pangkalan asing di Djibouti membuat

Eritrea terus meningkatkan kemampuannya dalam kekuatan militer. Salah satunya adalah melakukan wajib militer dengan durasi yang panjang. Djibouti dengan kemampuan militernya yang cenderung kecil berusaha untuk melindungi wilayahnya sebagai kepentingan mereka. Dan begitu pula dengan Eritrea dengan kemampuan militer yang lebih besar berusaha melindungi Ras Doumeira sebagai bagian dari kepentingannya.

Kedua negara rela mengorbankan setiap kemampuan militernya untuk menjaga kepentingan mereka masing-masing. Eritrea kehilangan banyak hal dalam kemampuan militernya seperti berkurangnya personel militer, anggaran dan persenjataan demi kemenangan semu. Hal tersebut dikarenakan pada akhirnya Ras Doumeira juga tidak sepenuhnya berada dalam kontrol kedua negara. Disisi lain Djibouti berhasil mempertahankan status Ras Doumeira yang tetap menjadi wilayah *shared control*. (Siahaan, 2013)